

# SKRIPSI

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KOTA MATARAM (Studi di Universitas Muhammadiyah Mataram)

### *THE IMPLEMETATION OF A NO-SMOKING AREA POLICY IN THE CITY OF MATARAM (Study Of Muhammadiyah University Of Mataram)*

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan  
dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada program studi  
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram*



**OLEH**

**IRA WATI**  
**216110002**

**JURUSAN URUSAN PUBLIK  
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2020**

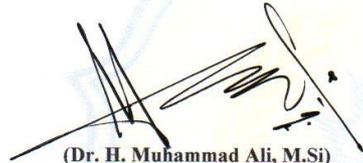
**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini disetujui oleh pembimbing untuk diujikan ke Panitia Ujian  
Skripsi Program Studi Administrasi Publik Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2020

**Dosen Pembimbing I**



(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)

NIDN.0806066801

**Dosen Pembimbing II**



✓ (Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP)

NIDN. 0822048901

Mengetahui,  
Program Studi Administrasi Publik

Ketua



✓ Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP

NIDN.0822048901

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

**IRA WATI**  
NIM. 216110002

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada  
Jurusan Urusan Publik Telah disetujui Oleh Tim Penguji  
Pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini.  
Mataram, 06 Agustus 2020**

Tim Penguji

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801



Ketua

2. **Rahmad Hidayat, S.Ap., M.Ap**  
NIDN. 0822048901



Anggota

3. **Drs. H. Abdurrahman, M.M**  
NIDN. 0804116101



Anggota

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan  
**(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)**  
NIDN. 0806066801

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan tinggi ini.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Mataram, 06 Agustus 2020



**IRA WATI**

216110002



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRA WATI  
NIM : 216110002  
Tempat/Tgl Lahir : TRANSIOL, 11-12-1998  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 082 310 029 602  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

... IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAM TANPA ASAP di  
KOTA MATARAM (Studi Universitas Muhammadiyah Mataram)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : .....

Penulis



IRA WATI  
NIM 216110002

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

*Harapan adalah cermin masa depan.*

*“Ketika kita berharap, maka tentunya kita harus berbuat dan ketika itulah kita bisa meraih apa yang kita harapkan”*



## PERSEMBAHANKU

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayat, rezeki atas semua yang saya lakukan dalam penyusunan skripsi ini
2. Untuk Orang tua dan adik tercinta yang selalu memberikan motivasi, semangat, cinta dan kasih sayang selama ini
3. Untuk Keluarga besar saya yang selalu membantu, memberikan perhatian serta selalu mendoakan atas penyusunan skripsi ini
4. Untuk diri pribadi terus berjuang untuk meraih kesuksesanmu
5. Untuk teman-teman seperjuangan terima kasih selama ini kalian terus memberikan semangat yang tiada hentinya
6. Untuk semua Dosen Program Study Administrasi Publik dan selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas waktu, saran dan bimbingannya selama ini
7. Semoga Allah selalu merahmati kita semua dan selalu memberkahi hamba-hambanya yang senantiasa tunduk terhadap perintah-Nya

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga peneliti menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KOTA MATARAM (Studi di Universitas Muhammadiyah Mataram)”**. Berkat rahmat-Nya pula penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Segala Upaya telah penulis lakukan untuk menyelesaikan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, diantaranya:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Satu.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.Ap., M.Ap selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Sekaligus Dosen Pembimbing Dua.
4. Kedua orang tua, sahabat, pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Diharapkan, Skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Selain itu, kritik dan saran yang membangun sangat sangat penulis harapkan dari para pembaca sekalian agar Skripsi ini bisa lebih baik lagi.

Mataram, 10 Juni 2020

IRA WATI  
216110002

**ABSTRAK**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA  
ASAP ROKOK**

Ira wati<sup>1</sup>, Dr. H. Muhammad Ali, M.Si<sup>2</sup>, Rahmad Hidayat, S.AP., M. AP<sup>3</sup>

Program Atudi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Prevalensi merokok di Indonesia sangat tinggi di berbagai lapisan masyarakat, terutama pada laki-laki, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Perilaku merokok kaum laki-laki mudah kita jumpai sekitar kita, kecenderungan merokok terus meningkat dari tahun ke tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Universitas Muhammadiyah Mataram dan untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Universitas Muhammadiyah Mataram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, berlokasi di Universitas Muhammadiyah Mataram. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Mataram (Studi Di Universitas Muhammadiyah Mataram) adalah sebagai berikut: (1) Komunikasi, sudah pernah melakukan sosialisasi terkait KTAR, baik itu melalui kegiatan imtaq, spanduk yang tempel di tiap fakultas, ataupun lewat pertemuan antara dosen dan mahasiswa pada saat proses belajar mengajar. (2) Sumber, berdasarkan pengamatan penulis bahwa sumber daya sudah memadai namun belum maksimal dari segi pelaksanaannya. (3) sikap implementor sudah seutuhnya mendukung terkait diterapkannya kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Universitas Muhammadiyah Mataram tersebut, (4) salah satu aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan, merupakan faktor yang memiliki peranan penting dalam menentukan berhasil tidaknya sebuah kebijakan yang akan di laksanakan.

**Kata kunci: Implementasi kebijakan, tanpa asap rokok.**

<sup>1</sup> Mahasiswa

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF A CIGARETTE FREE ZONE POLICY

Ira wati1, Dr. H. Muhammad Ali, M.Si2, Rahmad Hidayat, S.AP., M. AP3

Public Administration Studi Program, Faculty of Social and Political Sciences,

Muhammadiyah University of Mataram

The prevalence of smoking in Indonesia is very high in various levels of society, especially men, ranging from children, adolescents, to adults. The smoking habit of men is easy to find around us. The tendency to smoke continues to increase from year to year, both for men and women. This study aimed to describe the implementation of the smoke-free zone policy at Muhammadiyah University of Mataram and to describe the inhibiting factors and supporting factors in the implementation of the smoke-free zone policy at Muhammadiyah Mataram University. The research method used in this study was a qualitative approach with a descriptive method. The study is located at the Muhammadiyah University of Mataram. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation with data analysis, namely: data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study showed that the implementation of the Free-Smoking zone Policy in the Mataram (Study at the Muhammadiyah University of Mataram) is as follows: (1) Communication; they have conducted socialization related to KTAR, either through IMTAQ activities, banners posted on each faculty, or through meetings between lecturers and students during the teaching and learning process. (2) Source; based on the observations; the resources are adequate but not maximized in terms of implementation. (3) the attitude of the implementor is completely supportive of the implementation of the smoke-free zone policy at the Muhammadiyah University of Mataram, (4) one of the aspects that influence the implementation of policies, is a factor that has an important role in determining the success or failure of a policy to be implemented.

Keywords: Policy implementation, no cigarette smoke.

1 Student

2 Main Instructors

3 Companion Advisor

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM  
A. KEPALA  
LABORATORIUM BAHASA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Moh. Fauzi Bafadal, M.Pd

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Konsep Kebijakan Publik.....	10
2.2.1 Pengertian Kebijakan.....	10
2.2.2 Fungsi Kebijakan.....	13
2.2.3 Tahap Kebijakan.....	14
2.3. Konsep Implementasi Kebijakan Publik .....	16
2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijaka .....	16
2.3.2 Model Implementasi Kebijakan .....	22
2.4. Konsep Kawasan Tanpa Asap Rokok .....	28
2.4.1 Pengertian Kawasan Tanpa Rokok .....	28
2.4.2 Dasar Hukum Kawasan Tanpa Asap Rokok .....	28
2.4.3 Manfaat Kawasan Tanpa Asap Rokok .....	32

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	33
3.3. Informan.....	34
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	34
1. Data Primer.....	35
2. Data Skunder .....	35
3.5. Tehnik Pengumpulan Data.....	35
1. Tehnik Observasi.....	36
2. Tehnik Wawancara.....	36
3. Tehnik Dokumentasi.....	37
3.6. Teknik Analisis Data.....	37
3.7. Keabsahan Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1. Gambaran umum UMMAT.....	41
4.2. Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Ummat.....	57
4.3. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Ummat. ....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
5.1. Kesimpulan .....	75
5.2. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara sosial dan ekonomi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization* (WHO), kesehatan adalah kondisi rohani, sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Dikatakan sehat secara fisik adalah orang tersebut tidak memiliki gangguan apapun secara klinis. Sehat secara mental /psikis adalah sehatnya pikiran, emosional, maupun spiritual dari seseorang (WHO, 2013).

Sedangkan dikatakan sehat secara sosial adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan dimana ia tinggal. Kemudian orang dengan kategori sehat secara ekonomi adalah orang yang produktif, produktifitasnya mengantarkan ia untuk bekerja dan dengan bekerja ia akan dapat menunjang kehidupan keluarganya. Dan salah satu yang menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu itu kegiatan merokok.

Merokok adalah salah satu kegiatan yang banyak dilakukan orang hampir diseluruh dunia. *World Health Organization* (WHO) memperingatkan lebih dari 40 persen perokok di dunia meninggal karena penyakit paru-paru, seperti kanker, penyakit pernapasan kronis, dan TBC. *World Health Organization* (WHO) mengatakan, setiap tahun penggunaan tembakau membunuh setidaknya delapan juta orang. Namun *World Health Organization* (WHO), mencatat bahwa jumlah pengguna tembakau di seluruh dunia tetap stabil pada 1,2 miliar karena pertumbuhan populasi. Kerstin Schotte petugas teknis WHO di departemen yang sama dengan Prasad mencatat penurunan tajam dalam kecenderungan merokok di negara-negara kaya, dibandingkan dengan yang lebih miskin. Dan di beberapa negara berpendapatan rendah dan

menengah bahkan mengalami peningkatan angka kecenderungan merokok. Ke negara-negara inilah industri tembakau saat ini beralih. Mereka mengetahui, tembakau tidak disukai di Eropa dan Amerika utara sehingga mereka beralih ke negara-negara berpendapatan rendah dan menengah (WHO, 2017).

*World Health Organization* (WHO) merekomendasikan sejumlah langkah efektif dan murah yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi tembakau. Langkah Ini termasuk menciptakan lingkungan bebas rokok, memberlakukan larangan terhadap semua bentuk iklan tembakau, promosi dan sponsor. *World Health Organization* (WHO) juga menyarankan untuk mengenakan pajak tinggi atas penjualan rokok dan produk tembakau lainnya agar tidak terjangkau bagi banyak orang, terutama anak muda (WHO, 2014). Salah satu Negara yang mengkonsumsi rokok terbesar dunia adalah Negara Indonesia.

Prevalensi merokok di Indonesia sangat tinggi di berbagai lapisan masyarakat, terutama pada laki-laki, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Perilaku merokok kaum laki-laki mudah kita jumpai sekitar kita, kecendrungan merokok terus meningkat dari tahun ke tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan, hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita. Data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) dan Riskedas (Riset kesehatan dasar) tahun 2018 menunjukan bahwa Prevalensi perokok pada remaja usia sekolah atau usia 10-18 tahun mengalami kenaikan. Persentase perilaku merokok remaja pada Riskedas 2018 tercatat sebesar 9,1 persen, meningkat dari Riskedas 2013 yakni 7,2 persen. Terkait dengan perilaku merokok pada remaja cenderung naik.

Menurut Riset kesehatan dasar (Riskedas) Tahun 2017 menyebutkan, sebesar 85% rumah tangga di Indonesia terpapar asap rokok. Estimasinya adalah delapan perokok meninggal karena perokok aktif dan satu perokok pasif meninggal karena terpapar asap rokok orang lain. Berdasarkan penghitungan tersebut maka setidaknya ada 25.000 kematian di Indonesia terjadi karena asap rokok orang lain. Jumlah perokok diseluruh dunia mencapai 1,2 miliar orang. Sebanyak 800 juta orang berada di Negara berkembang.

Menurut data *World Health Organization* (WHO), Indonesia merupakan Negara ketiga dengan jumlah kelompok terbesar setelah China dan India. Peningkatan konsumsi rokok berdampak pada makin tingginya beban penyakit yang diakibatkan oleh rokok dan makin tingginya angka kematian (Anam, 2019: 2-6).

Adapun tindakan pemerintah Indonesia sebagai bentuk solusi terhadap bahaya merokok antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia memiliki UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang ada pasal-pasal yang mengatur kebiasaan merokok, juga ada PP 109 tahun 2012 yang mengatur lebih rinci tentang isi UU 36 tahun 2009 di bidang penanggulangan merokok, dan juga ada Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan juga berbagai Peraturan Daerah serta Aturan (SK) Gubernur, Bupati dan Walikota.

2. Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat

Tentang dampak merokok bagi kesehatan. Hal ini dilakukan melalui berbagai media yang ada, baik di tempat sarana pelayanan kesehatan maupun juga tempat-tempat umum.

3. Peringatan kesehatan dalam bentuk gambar

Untuk Indonesia, mulai 24 Juni 2014 maka semua rokok yang dijual harus mencantumkan satu dari lima pilihan gambar peringatan kesehatan.

#### 4. Pengaturan iklan rokok

Harus diakui bahwa iklan berperan penting dalam pembentukan opini masyarakat, termasuk mau merokok atau tidak. Dalam aturan yang ada di Indonesia maka sudah ada semacam aturan tentang hal ini, walau memang belum dalam bentuk pelarangan total.

#### 5. Terwujudnya Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR)

Hal ini untuk menjamin bahwa warga masyarakat, setidaknya di tempat-tempat umum, dapat menghirup udara bersih sehat dan bebas dari asap rokok. Dari waktu ke waktu kita lihat bahwa di sekitar kita makin banyak ruangan bebas asap rokok ini, termasuk di bioskop dan mal-mal besar.

#### 6. Terselenggaranya pelayanan kesehatan untuk bantuan orang yang ingin berhenti merokok.

Melihat upaya yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk solusi bahaya merokok, Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Mengirim Surat No. 06/ SM/ MTT/III/2010, Tanggal 01 Dzulqa'dah 1432 H/29 September 2010 M, kepada Pimpinan Persyarikatan, Ketua Majelis dan Lembaga PP Muhammadiyah, Ketua Organisasi Otonom Persyarikatan Muhammadiyah dan Pimpinan Amal Usaha di Lingkungan Muhammadiyah tentang hukum merokok. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (QS. An Nisaa:29).

Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai salah satu Amal Usaha Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB mengeluarkan surat Nomor 526/II.3.AU/A/2011, Tanggal 06 shafar 1433 H/31 Desember 2011 M, Perihal peringatan kepada para pembantu Rektor, para Dekan/Direktur, Para Kepala Lembaga, Badan, UPT, Kepala Biro, Kepala Bagian, KTU di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram agar menerapkan Surat Edaran PP Muhammadiyah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah yang ingin dirumuskan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) di Universitas Muhammadiyah Mataram?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) yang diberlakukan di Universitas Muhammadiyah Mataram?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin di capai oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) di Univeritas Muhammadiyah Mataram.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan untuk memahami kebijakan publik khususnya studi implementasi dan evaluasi kebijakan publik.

#### 2. Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di instansi pendidikan.

#### 3. Bagi universitas Muhammadiyah Mataram

Diharapkan hasil penelitian dapat member masukan bagi pihak Universitas Muhammadiyah Mataram agar dapat menerapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.

#### 4. Bagi masyarakat, Penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti lebih dalam kebijakan pemerintah yang ingin disampaikan oleh iklan layanan masyarakat.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dibawah ini merupakan acuan penulis dalam melakukan penelitian untuk memperkaya wawasan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Namun penulis menjadikan penelitian tersebut sebagai refrensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Untuk memahami penelitian terdahulu, maka penulis dapat menjelaskan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>
1.	Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Medan (2015). Elisabet	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya komunikasi pemerintah daerah kepada pimpinan sekolah dalam hal sosialisasi penerapan KTAR. Masih kurangnya sumber daya dalam hal sarana dan prasaran untuk penerapan KTAR di sekolah, masih kurangnya tanggapan dari sasaran pelaksanaan kebijakan dan masih kurang berjalannya birokrasi dalam penerapan KTAR di sekolah.	Persamaan penelitian ini sama penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan mengkaji tentang masalah rokok dan KTAR. Sedangkan perbedaanya berbeda pada objek penelitian, dimana penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Mataram, dan penelitian ini lebih fokus pada Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok.
2.	Kepatuhan Mahasiswa Terhadap Penerapan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari responden yang	Persamaan penelitian ini sama penelitian terdahulu

	<p>Kawasan Bebas Asap Rokok Di Lingkungan Kampus Universitas Hasanudin (2014). Hudriani</p>	<p>patuh terhadap penerapan kawasan bebas asap rokok dikampus Unhas (40,2%), terdapat 43,9% yang berpengetahuan tinggi, sebagian besar bersikap positif (52,7%) dan 52,5% memiliki pengaruh dari lingkungan sosialnya. Sedangkan, dari 59,2% responden yang tidak patuh sebagian besar responden berpengetahuan rendah (66,7%, memiliki sikap negative (69,4%) dan tidak ada pengaruh dari lingkungan social (71,2%).</p>	<p>sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan mengkaji tentang masalah rokok dan KTAR. Sedangkan perbedaannya berbeda pada objek penelitian, dimana penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Mataram, dan penelitian ini lebih fokus pada Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok.</p>
<p>3.</p>	<p>Pengaruh Faktor Pengelola Terhadap Kepatuhan Pelaksana Peraturan daerah tentang KTAR Pada hotel bintang di kabupaten Bandung (2014). Ni Luh Putuh</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa diketahui 70,2% pengelolah adalah laki laki dan sebagian besar (92,2%) berpendidikan SI/S2. Kepatuhan hotel berbintang terhadap perda KTAR masih rendah (15,4%).-Faktor yang meningkatkan kepatuhan adalah pengetahuan yang baik (PR=2,0; 95% CI:0,84,9), sikap yang tidak baik (PR=2,5; 95% CI:0, 88,2), dukungan yang nyata</p>	<p>Persamaan penelitian ini sama penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan mengkaji tentang masalah rokok dan KTAR. Sedangkan perbedaannya berbeda pada objek penelitian, dimana penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Mataram, dan penelitian ini lebih fokus pada Implementasi kebijakan</p>

	<p>terhadap perda KTAR (PR=4,25;95% CI:1.03-17,58) dan adanya himbaun organisasi (PR=1,8; 95% CI:0,7,5). Sedangkan perilaku merokok pengelolah berpengaruh secara bermakna menghambat kepatuhan.</p>	Kawasan Tanpa Asap Rokok.
--	--	---------------------------

## 2.2 Konsep Kebijakan Publik

### 2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan (Keban, Jeremias. 2008: 60). Thomas R Dye sebagaimana dikutip islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan public sebagai “*is Whatever goverments chooseto to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak di lakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan menyatakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Kemudian menurut Robert Eystone dalam Winarno (2012:20) secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungam suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eystone mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Bridgemen dan Davis (2004:4-7) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni:

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan adalah *a means to an end*, alat untuk mencapai sebuah tujuan.

2. Kebijakan publik pada hakikatnya menyangkut pencapaian tujuan.

Artinya kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

3. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

4. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model, atau hipotesis mengenai sebab dan akibat.

Kebijakan kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi -asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu membuat disinsentif yang mendorong tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan perkiraan (proyeksi) mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

“Dunn (dalam Pasolong, 2015: 3) Mengatakan bahwa kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti pertahanan

keamanan, energi, kesehatan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas perkotaan dan lain-lain”.

Definisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa:

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik.
3. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Dalam pendekatan manajemen kebijakan, proses kebijakan terjadi melalui tiga fase, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sebagai bagian dari proses kebijakan, implementasi kebijakan menurut Anderson (1979: 21), yaitu *the application of the policy by the government's administrative machinery to the problem*. Sedangkan Grindle (1980:15) mengemukakan bahwa *implementation—ageneral process of administrative action that can be investigated at specific program level*.

### **2.2.2 Fungsi Kebijakan Publik**

Fungsi Kebijakan Publik adalah sebagai berikut:

#### **1. Ketertiban**

Kebijakan publik dibuat agar terjadinya ketertiban. Ketertiban ini akan memperlancar pembangunan. Pembangunan di berbagai bidang dapat terlaksana dengan baik. Pihak-pihak yang ingin berinvestasi juga akan percaya dengan kondisi Indonesia. Semua dapat berjalan dengan adanya kebijakan publik. Bayangkan saja, jika tidak ada kebijakan publik. Masyarakat saling bertikai untuk mendapatkan haknya.

## 2. Menjamin Hak Asasi

Fungsi lain kebijakan publik adalah menjamin pelaksanaan hak asasi. Agar setiap orang dapat terpenuhi hak asasinya. Tidak ada yang tertindas karena orang lain melanggar hak asasinya. Atau karena orang lain menuntut hak asasi dirinya tanpa memikirkan kepentingan orang lain.

## 3. Petunjuk Program Kegiatan

Setiap mencapai tujuan tentu ada rencana untuk kegiatan. Kebijakan publik ini ibaratnya menjadi petunjuk dan rambu dalam mencapai kegiatan. Ada beberapa hal yang tidak tercantum dalam rencana kegiatan. Dengan dikeluarkannya kebijakan publik, masalah yang terjadi di tengah akan disesuaikan rambu kebijakan publik yang dibuat.

## 4. Arahan Kepada Pelaksana

Kebijakan publik dibuat atau dikeluarkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Misalnya, kebijakan menaikkan harga BBM, kebijakan pembangunan jalan tol, dan sebagainya. Semua dikeluarkan sesuai masalah atau perkembangan yang ada. Tol Pantura untuk mengatasi kemacetan, khususnya di saat menjelang Idul Fitri. Pengeluaran kebijakan ini menjadi arahan kepada pelaksana di lapangan. Kebijakan akan menentukan kapan pekerjaan harus selesai. Pelaksana akan mencari jalan bagaimana agar pekerjaan dan program selesai tepat waktu.

## 5. Menyelenggarakan Administrasi dan Urusan Tata Usaha

Kebijakan publik berfungsi sebagai penyelenggara administrasi dan urusan tata usaha. Setiap kebijakan akan dicatat, sehingga jelas pelaksanaan, tujuan, dan hasilnya untuk kemudian dievaluasi. Tanpa kebijakan publik, seorang pimpinan bisa saja mengeluarkan pernyataan tentang sesuatu, tetapi itu tidak bisa dijadikan aturan atau ketentuan. Tidak tercatat

dan tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat sebagai sasaran hampir setiap kebijakan yang ada.

### **2.2.3 Tahap Kebijakan Publik**

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu formulasi kebijakan, Implementasi kebijakan, Evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Winarno, 2007: 32-34):

#### **a. Formulasi Kebijakan**

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

#### **b. Implementasi Kebijakan**

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

#### **c. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Dari beberapa tahap implementasi kebijakan publik diatas, penulis memilih tahap implementasi kebijakan publik karena tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

## **2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

### **2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

“Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implementasi* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu (Wahab, 2012: 67).”

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman (2002: 70), implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan (2004:39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Dari pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh

berdasarkan acuan rencana-rencana tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Tahapan implementasi merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan atau program. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pelaksanaannya di lapangan. Seperti yang di kemukakan oleh Suharno (2010:187).

Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Agustino (2016:126) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai:

“Tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usahausaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”.

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan (Wibawa, 1994: 60). Implementasi kebijakan mengandung logika proses yang *top-down*, maksudnya, menurunkan atau menafsirkan keputusan yang masih abstrak atau makro (bersifat politis) menjadi yang bersifat konkrit atau mikro (bersifat birokratis) dengan merumuskan strategi dan pilihan metode tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya, lalu merumuskan program atau proyek publik untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program, dan selanjutnya dilaksanakan (Suharto, 2006: 80). Berdasarkan konsep implementasi kebijakan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan untuk merealisasikan tercapainya suatu harapan yang telah dirumuskan dalam suatu kebijakan. Jadi, implementasi kebijakan merupakan upaya untuk menjalankan atau merealisasikan kebijakan publik yang terjemahkan dalam program dan

kegiatan, di mana melalui implemementasi kebijakan tersebut, diharapkan apa yang menjadi tujuan publik dapat tercapai.

Implementasi kebijakan publik dikatakan berhasil jika apa yang diharapkan dari adanya kebijakan tersebut dapat diraih, yang dicapai melalui pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hasilnya adalah bahwa apa yang menjadi tujuan tidaklah melenceng dari tujuan semula. Dalam suatu proses implementasi kebijakan terkadang tidak selancar apa yang diperkirakan sebelumnya. Dalam banyak kasus, seringkali implementasi kebijakan menemui suatu kendala atau tantangan, terutama karena adanya berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan publik bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karenanya, belum tentu suatu kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan baik. Kadangkala apa yang sudah ditetapkan dalam kebijakan publik berbeda dengan keadaan di lapangan dan hasil yang dicapai.

Keberhasilan implementasi kebijakan (publik) dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara pelaksanaan/penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, sasaran dari kebijakan itu sendiri dan memberikan hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan kebijakan adalah bahwa semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka akan semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan *output* yang telah digariskan (Nogi, 2003: 31).

Untuk mengantisipasi kegagalan implementasi kebijakan, para pelaksana kebijakan harus mengetahui dan memahami beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Rumusan kebijakan yang dibuat tidak spesifik, sehingga menimbulkan kebingungan dan subyektivitas penafsiran masing-masing pelaksana kebijakan.
- b) Adanya pertetangan antara satu tujuan kebijakan dengan tujuan kebijakan lainnya
- c) Kurangnya insentif bagi para pelaksana kebijakan, sehingga membuat implementasi kebijakan tidak dilakukan secara sungguh-sungguh
- d) Adanya keterbatasan sumberdaya kebijakan (manusia, materi, waktu, dan ruang)

- e) Terjadinya kegagalan komunikasi antarpelaku yang terlibat dalam implementasi kebijakan (Wahab, 2001: 273).

Menurut Peters (dalam Nogi, 2003:22) mengatakan implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor;

1. Informasi

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan basil-basil dan kebijakan itu.

2. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masihsamarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber dayapembantu.

3. Dukungan

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

”Sementara menurut Edwards III (Dalam Suharno, 2013:170-171), ada empat *critical factors* yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, Disposisi/kecendrungan, dan struktur birokrasi. Adapun penjelasan dari keempat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah sebagai berikut”

- a. Komunikasi yaitu upaya penyampaian suatu pesan dari komunikator sehingga menimbulkan dampak tertentu kepada komunikan Dalama implementasi program, komunikasi digunakan untuk menghubungkan antar aparat pelaksana karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif ,para *policy maker* dalam meminbta para pelaksana

(*implemetors*) tidak sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang lebih penting adalah adanya konsistensi komunikasi dari atas kebawa, dalam arti arus komunikasi yang terjadi harus jelas dan tegas.

- b. Sumber daya bagaimanapun jelas dan konsistennya aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya dalam penyampaian ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut juga tidak akan bias efektif.
- c. Disposisi/kecenderungan yaitu keinginan atau kesepakatan para pelaksana melaksanakan kewajiban. Para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
- d. Struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang dimaksud disini mencakup aspek-aspek, seperti organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar.

Adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dalam Abdul Wahab Solichin (2012: 65), mengatakan bahwa :

“Implementasi adalah memahami ada yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau didefinisikan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

### **2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**

Model-model implementasi kebijakan publik menurut Nugroho (2011: 627), antara lain :

#### **a. Model Van Meter dan Van Horn**

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel: aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana/implementor, kondisi ekonomi-sosial-politik, dan kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.

#### **b. Model Mazmanian dan Sabatier**

Model ini disebut model kerangka analisis implementasi (a framework for implementation analysis). Model ini mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel. Variabel tersebut adalah variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen.

#### **c. Model Hogwood dan Gunn**

Model ini mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada Praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok. Kelemahannya,

konsep ini secara tidak tegas menunjukkan nama yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.

**d. Model Goggin, Bowman, dan Lester**

Model ini bertujuan mengembangkan model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mendapatkan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

**e. Model Grindle**

Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar adalah bahwa kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

**f. Model Elmore**

Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah

**g. Model George C. Edward III**

Model ini menegaskan bahwa masalah utama Administrasi Publik adalah *lack of attention to implementation* (kurangnya perhatian dari implementasi). Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully* (tanpa implementasi yang efektif, pembuat kebijakan tidak akan berjalan lancar). Edward menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu : komunikasi, resources, disposition, dan struktur birokrasi.

#### **h. Model Nakamura dan Smallwood**

Model ini menautkan pembentukan kebijakan dalam implementasi kebijakan secara praktikal. Konsep ini menjadi magnet yang sangat besar terhadap para praktisi kebijakan, yang justru mendekatkan ilmuwan kebijakan dan praktisi kebijakan. Kedekatan ini menjadikan pengetahuan implementasi kebijakan semakin mampu berkontribusi nilai bagi kehidupan bersama. Konsekuensinya adalah pengetahuan implementasi kebijakan tidak lagi menjadi monopoli para professor kebijakan publik, namun juga para praktisnya di birokrasi dan lembaga Administrasi Publik lainnya.

#### **i. Model Jaringan**

Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah complex of interaction processes di antara sejumlah aktor besar yang berada dalam suatu jaringan (*network*) actor actor yang independen, interaksi di antara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting di dalamnya.

Dari banyak Model Implementasi Kebijakan Publik Yang Dipaparkan diatas, maka pada penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Menurut Edward, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration (administrasi publik) dan public policy (kebijakan publik). Menurut Edward ada 4 (empat) faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut antara lain :

##### **a. Komunikasi**

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada Organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggap

dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan (Nugroho, 2011:636). Edward menyebutkan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur factor komunikasi. Indikator tersebut antara lain :

#### 1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

#### 2. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

#### 3. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

#### b. Sumber daya (*Resources*)

Hal ini berkenaan dengan ketersediaan sumber daya manusia menjalankan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Sumber daya yang penting menurut Edward dalam Agustino (2006:151) meliputi: staf yang memadai serta

keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas tugas mereka, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan-usulan di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi, salah satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

c. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

d. Struktur birokrasi

Edward dalam Nugroho (2011:636), menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Menurut Edward dalam Agustino (2006: 153), dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisas ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan standar operating procedures

(SOPs) dan pelaksanaan fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

## **2.4 Konsep Kawasan Tanpa Rokok**

### **2.4.1 Pengertian Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR)**

Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan atau penggunaan rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Secara umum, penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, dan secara khusus, tujuan penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman, memberikan perlindungan bagi bukan perokok, menurunkan angka perokok, mencegah perokok pemula dan melindungi generasi mudadari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif (NAPZA).

### **2.4.2 Dasar Hukum Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR)**

Dasar hukum dalam penelitian ini yaitu amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan juga sehat oleh negara dalam hal ini pemerintah. Kawasan tanpa rokok merupakan salah satu usaha

pemerintah dalam upaya memberikan lingkungan yang baik dan juga usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya.

Untuk dapat mewujudkan kawasan tanpa rokok, peran pemerintah sangatlah penting baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki beberapa urusan wajib yang harus dilaksanakan salah satunya adalah menangani bidang kesehatan. Penetapan pedoman kawasan tanpa rokok merupakan sebuah ketetapan yang dibuat oleh dua kementerian yang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara. Dalam kebijakan tentang pedoman kawasan tanpa rokok ini, Menteri Kesehatan akan bertugas mengurus segala hal yang berhubungan dengan kesehatan akibat rokok sedangkan Menteri Dalam Negeri akan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan bebas rokok. Kedua kementerian ini akan bekerja sama untuk dapat menjalankan program kawasan tanpa rokok Kesehatan bukanlah tugas dari pemerintah semata, namun menjadi kewajiban bersama untuk dapat mewujudkannya baik individu maupun masyarakat. Oleh karena itu pedoman kawasan tanpa rokok ini akan dapat berhasil jika seluruh masyarakat ikut berperan dalam mewujudkannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 /Menkes / PB / I / 2011 serta PP Nomor 109 tahun 2013. Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa Kewajiban setiap manusia sebagai individu untuk dapat hidup saling menghormati demi lingkungan sehat demi lingkungan yang sehat pula setiap individu diwajibkan untuk berperilaku hidup sehat. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan program hidup bersih dan sehat yang mendukung kebijakan tentang kawasan tanpa rokok. Selain itu pemerintah juga menetapkan kawasan-kawasan yang diharuskan bebasa

dari asap rokok yaitu pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja. Asap rokok yang timbul akibat kegiatan merokok jelas akan mengakibatkan pencemaran udara dan akan mempengaruhi kesehatan, Oleh karena itu pembatasan pencemaran udara sangatlah penting karena manusia memiliki hak untuk dapat menghirup udara yang bersih dan sehat.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa udara ambien adalah udara diluar lingkungan kerja yang sehat dan bersih serta aman bagi kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya yang dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya. Kebijakan kawasan tanpa rokok yang membatasi perokok melakukan kegiatan merokok, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat bebas asap rokok. Kawasan tanpa rokok merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah sangat sadar jika rokok sangatlah berbahaya bagi kesehatan manusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dijelaskan bahwa pengamanan rokok dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh rokok, melindungi penduduk usia produktif dari dorongan lingkungan untuk merokok serta meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat terhadap bahaya kesehatan.

Pemerintah kota mataram mengeluarkan Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok, yang di formulasikan dalam bentuk Peraturan daerah No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Lahirnya Peraturan Daerah tersebut karena bahaya yang ditimbulkan rokok tidak hanya terhadap perokok aktif tetapi juga sangat berbahaya bagi perokok pasif. Disamping itu Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) dianggap dapat menekan angka perokok, khususnya bagi perokok

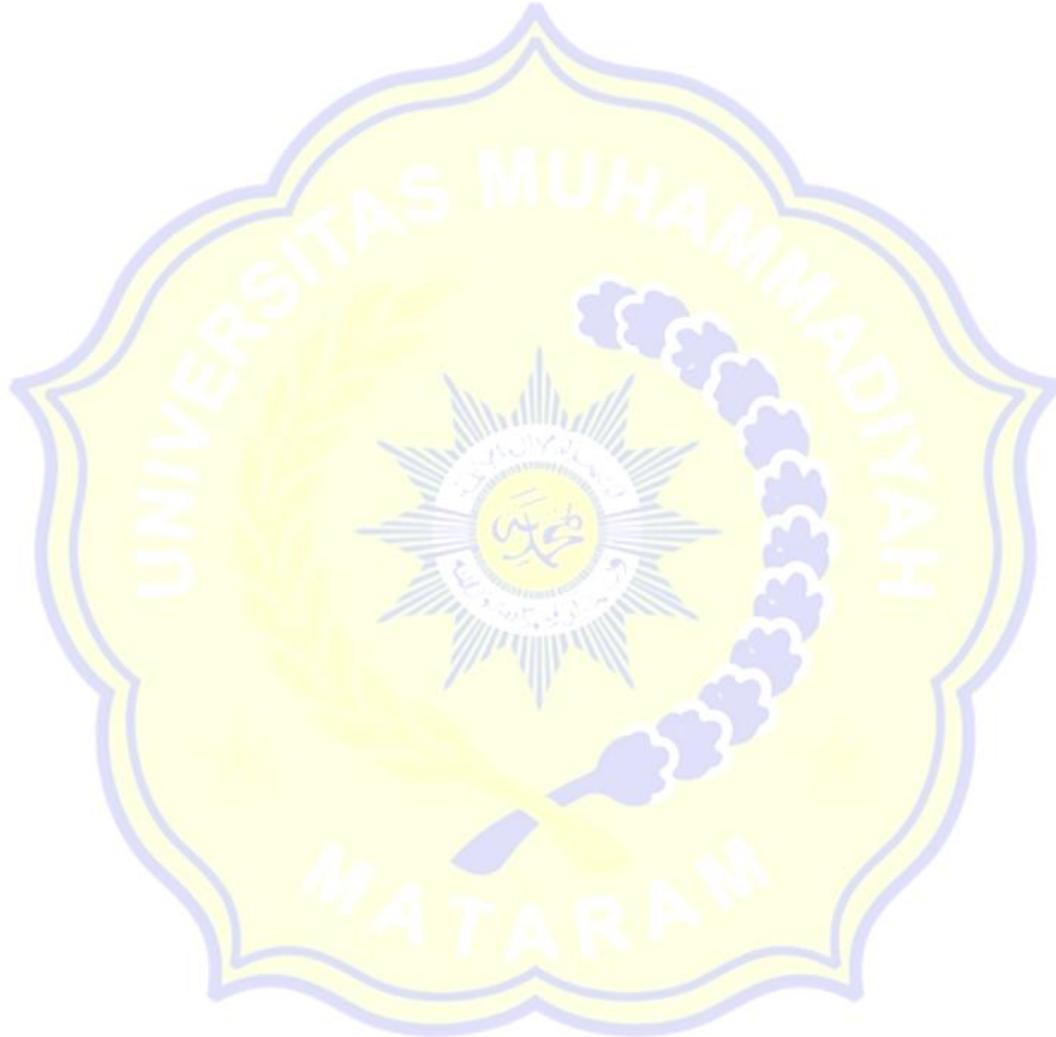
pemula yang belakangan cenderung meningkat. Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan. Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) di suatu wilayah pada dasarnya adalah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap perokok pasif dari dampak buruk asap rokok, serta menyediakan udara bersih dan sehat yang merupakan hak asasi manusia.

Dalam Pasal 8 Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf a seperti pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restaurant, taman kota, tempat rekreasi, halte dan terminal angkutan umum. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah di tempat atau gedung tertutup. Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 serta lembaga atau badan untuk menjual, membeli, mempromosikan, mengiklankan, produk rokok didalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. Dalam Pasal 9, setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b yang meliputi perkantoran pemerintahan baik sipil maupun tentara nasional (TNI/kepolisian Nrgara Republik Indonesia (POLRI), perkantoran swasta, dan Industri. Setiap lembaga dan atau badan mempromosikan, mengiklankan, ditempat kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, perkantoran swasta, dan industry. Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayt 1 dan ayat 2 adalah di tempat atau gedung tertutup.

### **2.4.3 Manfaat Kawasan Tanpa Asap Rokok**

1. Menghargai dan melindungi hak asasi bukan perokok.
2. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.

3. Memberikan citra positif bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan.
4. Membatasi ruang gerak perokok.
5. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyektif yang alamiah terhadap variabel mandiri (Sugiono, 2001:6).

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamia, dimana antara individu dengan latar atau focus penelitiannya tidak disolasi kedalam bentuk variable atau hipotesis, karena antara peneliti dengan tempat dimana dia melakukan penelitiannya merupakan suatu kesatuan yang utuh. selain itu, peneliti sendiri menjadi instrument kunci dalam penelitiannya, karena penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti dalam suatu kawasan tersendiri dan hanya peneliti yang mampu berinteraksi dengan orang- orang didalam kawasan tersebut, baik dalam bahasanya maupun didalam peristilahannya.

Sedangkan deskriptif merupakan salah satu bentuk metode penelitian yang berfungsi untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai Setting Sosial atau untuk eksplorasi dan klarifikasi, yang terbentuk dengan cara mendeskripsikan suatu fenomena peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia.

### **3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Mataram. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan lebih mudah untuk jangkauan informasi dan pengumpulan data, serta dianggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

### **3.3 Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan untuk tujuan tertentu (Sugiono, 2001:62). Teknik *purposive* ini didasarkan terutama pada signifikansi peran (kapasitas) dan keterlibatan (intensitas) mereka dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Informan adalah orang-orang yang paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Universitas Muhammadiyah Mataram. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Beberapa Dekan di Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan sumber-sumber penyedia informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian bagi peneliti. Menurut Jhon (1984) dalam Moleong (2008:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara (interview) dan pengamatan langsung (observasi) di lapangan dalam memperoleh data yang bersifat tambahan. Adapun data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

## **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau langsung saat melakukan penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari orang-orang yang terkait langsung dengan permasalahan tanpa melalui perantara.

## **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, yang diperoleh secara tidak langsung dapat berupa catatan atau informasi yang berupa dokumen atau buku-buku ilmiah, laporan-laporan, situs internet serta informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2005:62), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik Wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

#### **1. Teknik Observasi**

Menurut Hadavi dan Martini (1992:74), “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Adanya observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan pengamen jalanan yang berada di Surakarta, dalam kesehariannya melakukan pengamen. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan

pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

## **2. Teknik Wawancara**

Menurut Sugiyono (2010:194), Pengertian wawancara sebagai berikut: Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

## **3. Tehnik Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2013: 240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

### **3.6 Tehnik Analisis Data**

Menurut Moleong (2004:280-281), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, Wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat. Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini.

### **3.7 Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Moleong (2011: 432) terdapat enam kriteria keabsahan data yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Pada dasarnya derajat kepercayaan (kredibilitas) menggantikan konsep validitas interval dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan.

2. Kecakupan Referensial

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

### 3. Triangulasi

Triangulasi merupakan tehnik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi data yang yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding terhadap data yang telah ada.

#### a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut.

#### b. Triangulasi tehnik

Untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda, misalnya dengan melakukan observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Apabila terdapat hasil yang berbeda maka peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber data guna memperoleh data yang dianggap benar.

#### c. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Maka dari itu dalam melakukan kredibilitas data dilakukan dengan waktu atau situasi berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan ulang-ulang agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel.

### 4. Keteralihan (*transferability*)

Pengujian keteralihan data berkenaan dengan hingga mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Untuk melakukan keteralihan, peneliti berusaha

mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam upaya menunjang keberhasilan kinerja Anggota Dewan.

5. Kebergantungan (*dependability*)

Ketergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian ke lapangan, tetapi bias memberikan data. Peneliti ini perlu diuji dependability-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak. Maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing. Pengujian dependability dalam penelitian ini dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

6. Kepastian (*confirmability*)

Menguji kepastian data (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.